

ANALISIS RENCANA KEBIJAKAN AKSI BERSIH SAMPAH KOTA PEKANBARU

M Fajar Anugerah, Mhd Rafi Yahya

Universitas Abdurrah
fajar.anugerah@univrab.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah menyusun Rencana Aksi Daerah Bersih Sampah Kota Pekanbaru yang berisi Rencana dalam pengelolaan sampah. Rencana tersebut dibuat sesuai kajian evaluasi melihat kondisi persampahan saat ini terhadap hasil pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan analisis rencana aksi bersih sampah Kota Pekanbaru yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu konsep kebijakan Pemerintah terhadap Pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode ini sangat cocok digunakan pada penelitian ini guna menganalisis Analisa kebijakan dalam upaya rencana bersih sampah. Temuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dengan cara adanya dasar pemikiran perlunya rencana aksi daerah bersih sampah dengan dibuatnya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Pekanbaru. . Kedua, keterlibatan terhadap kebijakan rencana aksi bersih sampah dengan melihat interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat. Ketiga, tersedianya konsep dan rencana untuk mewujudkan prosedur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keempat, strategi dasar yang meliputi penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R.

Kata Kunci: Analisa, Sampah, Kota Pekanbaru.

Abstract

The Pekanbaru City Government through the Environment and Hygiene Service has prepared an Action Plan for the Pekanbaru City Clean Waste Area which contains a plan for waste management. The plan is made according to an evaluation study to see the current state of the waste on the results of development. The purpose of this study is to describe the analysis of the Pekanbaru City waste clean action plan which is intended to formulate a government policy concept on waste management. This study uses a qualitative method, this method is very suitable to be used in this study to analyze policy analysis in an effort to plan clean waste. The findings in this study are the first by way of the rationale for the need for an action plan for a clean waste area by making regional regulations that specifically regulate waste management in Pekanbaru. . Second, involvement in the clean waste action plan policy by looking at the integration that is built between the local cultural and social context. Third, the availability of concepts and plans to realize sustainable waste management procedures. Fourth, the basic strategy which includes promoting campaigns and education on waste management through the 3R.

Keywords: Analysis, Garbage, Pekanbaru City.

PENDAHULUAN (Huruf kapital, Cetak Tebal/Bold, Arial 12, Rata Kiri)

Kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak cukup lagi menjadi rujukan pengaturan persampahan. Perda tersebut lebih berorientasi pada penanganan kebersihan lingkungan saja dan penekanan kewajiban masyarakat membayar retribusi dan. Konsep penanganan sampah hanya ditekankan pada pengumpulan sampah, pengangkutan dan Penimbunan di TPA. Hal ini juga sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hasibuan 2016). Kedua perundang-undangan tersebut membawakan perubahan-perubahan sangat mendasar dalam pengelolaan sampah, baik menyangkut keseluruhan cara berpikir (mindset), orientasi dan spirit serta konsepsi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, Pengelolaan sampah kemudian menghasilkan banyak agenda perubahan kebijakan dalam pengelolaan sampah, yang tentunya harus diacu oleh setiap daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah didaerahnya masing-masing (Anugerah et al. 2020)

Peningkatan sampah atau limbah padat rumah tangga yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan bertambah 5 kali lipat pada tahun 2020. Rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan meningkat dari 800 gram per hari per kapita pada tahun 1995 menjadi 910 gram per hari per kapita pada tahun 2003. Untuk kota Jakarta, pada tahun 1998/1999 produksi sampah per hari mencapai 26.320 meter kubik. Dibandingkan tahun 1996/1997, produksi sampah di Jakarta tersebut naik sekitar 18%. Hal ini diakibatkan bukan saja karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan (Nandi 2005)

Pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di suatu Kota/ Kabupaten. Timbulan rata-rata sampah masyarakat perkotaan menurut pedoman penyusunan sanitasi lingkungan kementerian

pekerjaan umum 2,5m³/hari. Berdasarkan hasil survey dan pengamatan yang dilakukan jumlah sampah yang ada di Pekanbaru dibuang di Kelurahan Muara Fajar adalah adanya upaya-upaya pelayanan pengelolaan persampahan dilaksanakan dengan penanganan sampah skala lingkungan melalui pola 3R (*reduce, re-use, dan recycle*) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah. Data 2015-2017 menyebutkan timbulan sampah rumah tangga terbanyak ada dikecamatan tampan hingga mencapai 373 m³/hari (Fajar and Sujianto 2016)

Tabel 1.1

Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

No.	Sumber Sampah	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Anggota RT (Rerata= 4 org)	Timbulan Sampah Satuan Liter/M ³		
				(ltr/org/hari)	M ³	TON
1.	RT Besar	60.929	243.716	609.290	609,29	182,79
2.	RT Sedang	73.115	292.460	658.035	658,04	197,41
3.	RT Kecil	109.673	438.691	877.382	877,38	263,21
Total		243.717	974.867	2.144.707	2.144,71	643,41

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang bersumber dari Rumah Tangga di Kota Pekanbaru setiap harinya adalah 2.144,71 m³ atau 643,41 ton. Hingga saat ini, penanganan sampah tersebut masih belum optimal. Baru 11,25% sampah di daerah perkotaan yang diangkut oleh petugas, 63,35% sampah ditimbun/dibakar, 6,35% sampah dibuat kompos, dan 19,05% sampah dibuang ke kali/sembarangan. Sementara untuk di daerah pedesaan, sebanyak 19% sampah diangkut oleh petugas, 54% sampah ditimbun/dibakar, 7% sampah dibuat kompos, dan 20% dibuang ke kali/sembarangan. Jika pengelolaan sampah tersebut tetap tidak ditangani dengan baik akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti (Pirngadie and Unpas 2006) :

1. Gangguan kesehatan misalnya :
 - a. Kumpulan sarnpah dapat menjadi tempat pembiakan lalat, dan lalat ini mendorong penularan infeksi

- b. Sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus, seperti pes, leptospirosis, salmonellosis, tikus endemic, demam gigitan tikus, dan beberapa infeksi arboviral.

Pada kejadian pasca banjir di Jakarta tahun 2002 ini, jumlah kasus leptospirosis tercatat meningkat akibat tertimbunnya sampah di beberapa wilayah di Jakarta.

2. Penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah yang dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya,
3. Dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah-tanah yang tergenang air.
4. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke kali/sembarangan menyumbang sekitar 60% - 70% pencemaran sungai.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan *end of pipe solution*. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Berdasarkan data di atas, kurang dari 20% sampah yang ditimbulkan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan yang ditangani oleh pemerintah. Sesampainya di TPA pun, sampah tersebut pada umumnya dibuang pada TPA yang menggunakan metoda Open Dumping. Sampai dengan akhir Pelita V, baru 1,33% dari seluruh TPA yang ada di perkotaan di Indonesia yang menggunakan metoda pembuangan akhir sampah Sanitary Landfill (Adipura 1997) dan hingga saat ini, pengoperasiannya telah berubah menjadi metoda Open Dumping akibat keterbatasan dana operasi dan pemeliharannya (BLH Kota Pekanbaru n.d.)

Hal yang mendasar dalam pengelolaan sampah ini adalah sangat kompleks dan bersifat dinamis, kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) seperti Pemerintah, masyarakat, Industri, Pedagang dan LSM, Dinamis karena volume timbulan sampah akan berubah seiring dengan perubahan waktu. Kenyataan ini menyebabkan penanganan sampah tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis (mulai dari pewadahan, pengumpulan,

pengangkutan sampai pengolahan di TPA) tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Sangat diharapkan kiranya pelayanan persampahan kedepan akan mampu melayani minimal 80% Kota Pekanbaru relevan dengan volume sampah terangkut/terolah dibandingkan dengan timbulan sampah yang ada, upaya ini sejalan dengan pencapaian target dimaksud dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah menyusun Rencana Aksi Daerah Bersih Sampah Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang berisi Rencana, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan sampah. Rencana tersebut dibuat sesuai kajian evaluasi dengan melihat kondisi persampahan saat ini terhadap hasil pembangunan Kota Pekanbaru. Untuk itu pengelolaan sampah kedepan diharapkan dapat mengacu pada Rencana Aksi Daerah Bersih Sampah Kota Pekanbaru. Penelitian ini berusaha menggambarkan analisis rencana aksi bersih sampah Kota Pekanbaru yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu konsep kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta landasan hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut akan dijadikan suatu panduan untuk menyusun format/model kebijakan Pengelolaan sampah yang sesuai untuk dilaksanakan di Kota Pekanbaru.

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan Masyarakat mengenai urgensi konsep dasar dan konsep hierarki Pengelolaan sampah, yang wajib diacu dan diakomodasi dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan.

STUDI LITERATUR

Pengertian Perencanaan

Berkenaan dengan istilah perencanaan, Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan sebagai *“the process of preparing, in advance, and in a reasonably systematic fashion, recommendations for policies and courses of action, with careful*

attention given to their possible by-products, side effects, or „spillover effects”. Berdasarkan pengertian ini, perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diprakirakan dan diantisipasi. Mencermati pengertian ini, dapat dipahami bahwa bagaimana pun baiknya perencanaan, akan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, setiap perencana harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul akibat dari implementasi rencana yang dibuatnya.

Pengertian lain mengenai perencanaan disampaikan oleh John Friedmann. Dalam bukunya yang berjudul *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action* (1987), dinyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu: (1) perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi; (2) perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; (3) perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan; dan (4) perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Berdasarkan keempat unsur yang disampaikan oleh Friedmann ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan (Setiadi 2014)

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Sjafrizal 2016). Perencanaan atau Planning adalah merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Dalam istilah lain merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena semakin majunya perkembangan zaman maka diperlukan sistem perencanaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, penyusunan

perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta perumusan kebijakan dalam perencanaan suatu program.

Istilah perencanaan strategis yang diambil dari penerjemah *strategic planning* biasanya setara dengan penerjemah *strategic formulation*. Dari berbagai pemahaman tentang perencanaan strategis, salah satu yang cukup dikenal dan diikuti adalah pemahaman dari (Bryson 1988) khususnya karena karyanya secara khusus berfokus pada perencanaan strategis. Menurut Bryson, perencanaan strategis adalah sebuah disiplin yang berupaya menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan mendasar, yang membentuk dan membimbing organisasi untuk memahami dirinya sendiri (*what an organization is*), apa yang dikerjakannya (*what it does*), dan kenapa organisasi mengerjakannya (*what it does it*). Bryson juga mengemukakan bahwa ada beberapa langkah dalam membuat perencanaan strategi, yang secara berurutan adalah :

1. Membangun inisiatif dan kesepakatan terhadap dilakukannya proses perencanaan strategis. Pada tahap ini dilakukan negosiasi dan kesepakatan antara pengambil keputusan kunci dan pemuka-pemuka pendapat, khususnya yang berada dalam organisasi.
2. Mengidentifikasi mandat organisasi, termasuk mandat dari tim perumus rencana strategis.
3. Mengidentifikasi misi dan nilai organisasi. Misi lebih dari sekedar pembenaran (*justify*) keberadaan organisasi, misi memberikan batas arena ketika organisasi bekerja. Nilai organisasi ditentukan oleh kepuasan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
4. Melakukan penilaian lingkungan internal dan eksternal organisasi dengan menggunakan metode SWOT untuk menemukan "*key succes factor*" yang harus dipenuhi agar memenuhi kriteria keberhasilan yang dilekatkan pada organisasi.
5. Mengidentifikasi isu-isu strategis yaitu isu yang jika tidak ditangani akan mempengaruhi mandat, nilai, dan misi organisasi. Pernyataan isu strategis mempunyai tiga syarat, yaitu dirumuskan secara singkat, yaitu dalam satu paragraf, mencantumkan faktor-faktor yang menyebabkan menjadi isu, dan mengemukakan konsekuensi jika isu tersebut tidak/gagal ditangani.

Analisa Kebijakan Publik: Definisi dan Implementasi

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya (Miftah 2003). Sedangkan menurut (Van Meter and Van Horn 1975) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai *“Those actions by public or private individuals (or group) the are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Meskipun istilah kebijakan itu dapat berlaku secara umum, tetapi fakta menunjukkan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan.

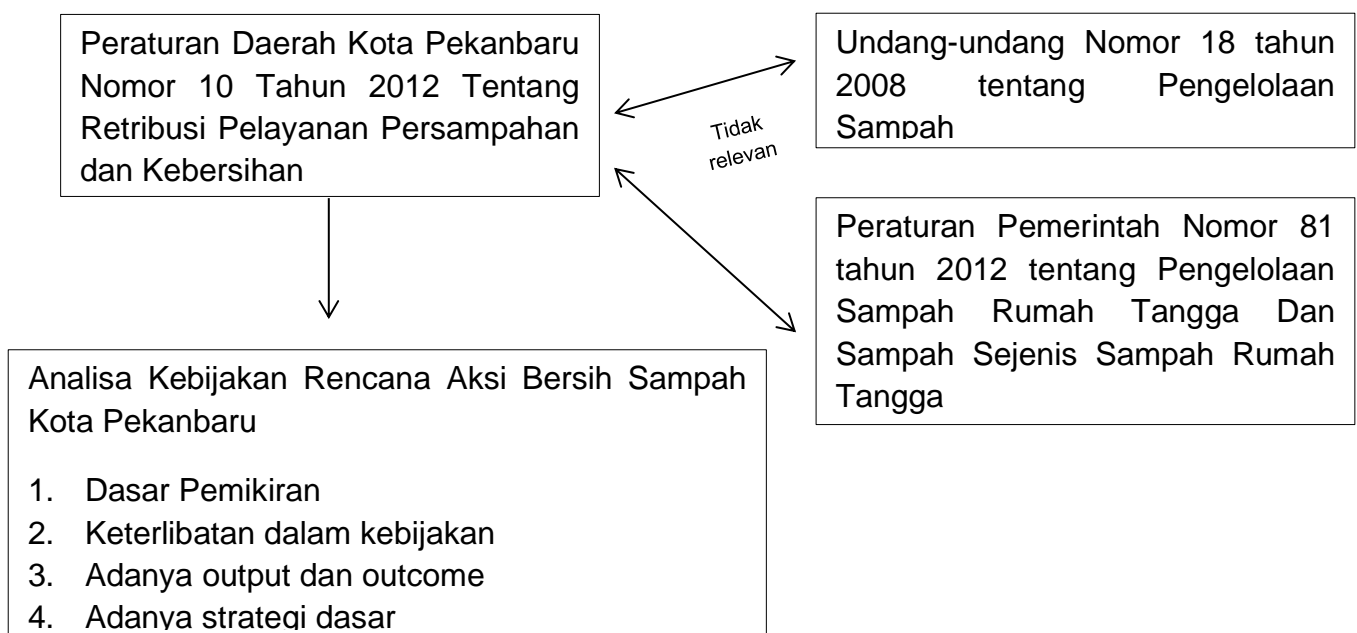
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung beberapa unsur, yaitu 1) adanya dasar pemikiran; 2) keterlibatan dalam kebijakan; 3) adanya output dan outcome; 4) adanya strategi dasar. Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijaksanaan adalah serangkaian fundamental yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu (Doltianus, Masjaya, and Kalalinggi 2017). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana dalam perda tersebut memuat tujuan dan pemecahan suatu masalah yang dalam penelitian ini adalah permasalahan sampah.

Konsep kebijakan diatas didefenisikan sebagai berikut :

1. Adanya dasar pemikiran yang mendorong aksi daerah ini adalah perlu adanya peraturan yang bersifat lokal yang dapat mengikat semua stakeholder pengelola sampah.
2. Keterlibatan dalam kebijakan publik adalah sejauh mana keberhasilan aksi bersih sampah tergantung pada seberapa jauh interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat, kondisi alam, struktur dan lembaga, kondisi ekonomi dan teknologi yang tersedia dan keterampilan

3. adanya output kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program, kuantitas dan kualitas hasil yang dicapai dalam kebijakan/program/kegiatan dan outcome perubahan atau manfaat yang merupakan hasil pelaksanaan program, akibat langsung/Intermediate effect kepada penerima manfaat. Adanya strategi dasar dalam pengurangan sampah yang akan berdampak kepada masyarakat penerima effect.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



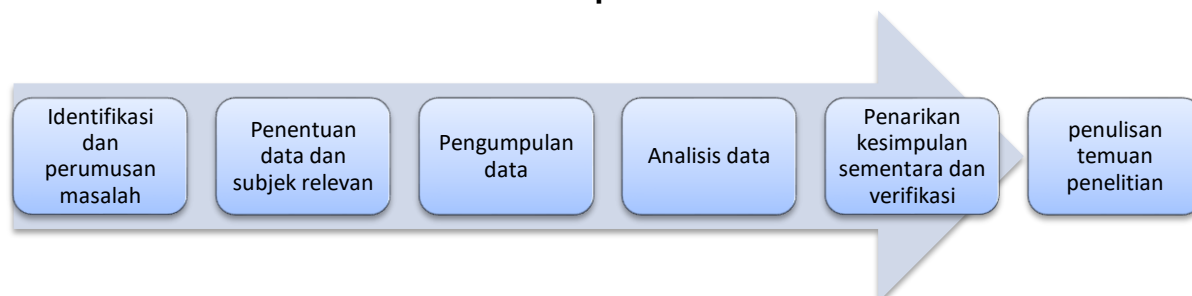
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Lexy J. Moleong 2019) Metode Kualitatif sangat cocok digunakan pada penelitian ini guna menganalisis Analisa kebijakan dalam upaya rencana bersih sampah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Alasan penulis melakukan penelitian di Pekanbaru karena melihat fenomena persampahan di Pekanbaru sudah sangat memprihatikan, kebijakan yang ada hanya mengeluarkan anjuran untuk membuang dan membayar retribusi sampah tanpa membahas bagaimana pengelolaan sampah yang lebih tepat, efektif dan menyeluruh.

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber penelitian yaitu; Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Penanggung jawab Tempat pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar, Pihak ketiga pengelola persampahan. Data sekunddr penelitian ini yaitu; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru, Dokumen Rencana Aksi Bersih Sampah Kota Pekanbaru dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota pekanbaru.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif dengan dating ketempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara dilakukan guna mengkonfirmasi data dan memperoleh keterangan. Penelitian ini menggunakan interview guide berupa daftar pertanyaan. Dokumentasi digunakan dengan mempelajari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terakhir penulisan hasil penelitian (Yin 2014)

Gambar 1. Tahapan Penelitian



PEMBAHASAN

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik6 . Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. (Prof, Dr, Mulyadi, Deddy, Drs. 2016). Menurut Doltianus kebijakan mengandung beberapa unsur, yaitu 1) adanya dasar pemikiran; 2) keterlibatan dalam kebijakan; 3) adanya output dan

outcome; 4) adanya strategi dasar. Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian fundamental yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Adanya Dasar Pemikiran Perlunya Rencana Aksi Daerah Bersih Sampah

Penduduk kota Pekanbaru yang terus meningkat tiap tahunnya memberikan kontribusi kompleksitas persoalan menyangkut sampah dan dampak yang diakibatkan pada lingkungan. Masalah ini diproyeksikan akan terus meningkat kalau tidak ada penanganan sampah yang tepat. Kapasitas daya tampung tempat pembuangan akhir Muara Fajar terus berkurang, sehingga memunculkan keawatiran persoalan sampah yang terjadi dikota-kota besar lain juga bisa terjadi di kota Pekanbaru. Penanganan sampah dengan model yang dilakukan saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan reformasi tindakan yang lebih tepat, efektif dan menyeluruh.

Adapun dasar pemikiran yang mendorong untuk menyusun rancangan peraturan daerah ini adalah sejumlah hal seperti belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Pekanbaru. Peraturan daerah yang dimaksudkan harus memuat bagaimana mengatur system pengelolaan sampah yang komprehensif. Sudah adanya Undang-undang no. 18 tahun 2008 tentang Sampah yang mengamatkan pembentukan peraturan teknis sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

- a. Perlu adanya peraturan yang bersifat lokal yang dapat mengikat semua stakeholder pengelola sampan (masyarakat, pemerintah, Pelaku Usaha) untuk berperan mengelola sampah (hak & kewajiban).
- b. Belum adanya pengaturan sanksi terhadap institusi pengelola; mekanisme resolusi konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan pengusaha.

1) Dampak Permasalahan Sampah Berskala Nasional

Dampak sosial; munculnya sejumlah permasalahan menyangkut penanganan sampah disejumlah daerah berpotensi untuk menimbulkan konflik antar daerah dan penolakan masyarakat terhadap pembukaan lokasi TPA/TPS

baru. Dampak terhadap lingkungan; semua TPA di Indonesia tidak ada yang beroperasi secara Sanitary Landfill (26% *Controlled Landfill* dan 74% *Open Dumping*) akibatnya: pencemaran tanah, air, dan udara; kesehatan masyarakat

2) Aspek Hukum Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Berpola end of pipe, yaitu pengelolaan dilakukan hanya setelah sampah ditimbulkan, Sangat bergantung pada TPA, Pelibatan Pelaku Usaha dan masyarakat belum optimal, berorientasi kepada pemerintah. Upaya mengantisipasi system pengelolaan sampah masa yang akan datang adalah upaya preventif, yaitu pengurangan sampah di sumbernya.

Kaji ulang atas perundang-undangan yang berkaitan dengan persampahan dan lingkungan bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan persampahan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada. Mengintegrasikan substansi pengaturan pengelolaan persampahan dalam rancangan peraturan daerah ini dengan undang-undang di atasnya sehingga sehingga tidak terjadi pertentangan di antara undang-undang tersebut.

Pemerintah kota Pekanbaru harus menpaduserasikan prinsip dan pola pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Sehingga terciptanya link and match antara pusat dan daerah dalam pengentasan persoalan sampah yang terjadi didaerah. Salah satu adalah dari aspek regulasi, ini menjadi pijakan hukum dan panduan umum bagi seluruh daerah termasuk bagi pemerintah kota Pekanbaru untuk mengatur secara teknis sesuai dengan karakteristik yang dimiliki daerah masing-masing. Dikeluarkannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjadi titik awal bagi daerah untuk menata ulang kembali penanganan dan proses pengelolaan sampah.

2. Keterlibatan dalam Kebijakan Aksi Bersih Sampah

Keberhasilan aksi bersih sampah tergantung pada seberapa jauh interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat, kondisi alam, struktur dan lembaga, kondisi ekonomi dan teknologi yang tersedia dan keterampilan. Dengan kata lain, hanya program dan proyek yang terus berinteraksi secara seimbang dengan konteks lokal, menyediakan layanan yang dihargai oleh populasi

sasaran, memudahkan untuk populasi sasaran dalam instrumen dan sumber daya yang berguna, teratur menyesuaikan instrumen sesuai dengan pengalaman dan umpan balik yang dapat memberikan kontribusi terhadap aksi bersih sampah

A. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial mengacu pada hubungan antara orang-orang. Aspek-aspek ini sangat banyak terkait dengan sektor kelembagaan serta bidang aturan dan pengetahuan.

a. Motivasi dan keterlibatan kelompok setempat

Tingkat motivasi dirasakan oleh masyarakat tergantung pada sejauh mana suatu program dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan antara semua pihak yang berkaitan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan kolektif (dampak sosial, pengurangan masalah, manfaat, kenyamanan). Untuk alasan ini, semua pihak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Perhatian khusus harus diberikan pada peraturan tradisional dan hak-hak mengenai pengelolaan sampah. Dalam aksi ini, perempuan khususnya memiliki cukup tanggung jawab. Jika perempuan tidak termasuk dalam keputusan, kebutuhan dan berkontribusi pada aksi, maka pihak tersebut akan salah menilai. Hal ini sering dapat menyebabkan kesalah pahaman dan perencanaan akan tidak memadai. Aksi bersih sampah berdampak pada hubungan sosial (distribusi daya dan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan, tradisional dan otoritas modern, populasi nomaden dan berpindah-pindah, dll). Perencana harus sadar bahwa baik masalah tersembunyi atau terbuka mungkin timbul. Namun, penciptaan manajemen yang seimbang dan metode partisipatif pengambilan keputusan merupakan solusi yang biasa dapat diterima.

b. Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Strategi Manajemen Berbasis Masyarakat menunjukkan perilaku transparan pada bagian dari semua pihak dalam aksi ini. Ini termasuk pilihan metode negosiasi yang tepat untuk menilai kebutuhan riil dan potensi struktur setempat. Solusi alternatif harus dikembangkan dan dibandingkan. Salah satu tugas utama dalam pengelolaan berbasis masyarakat adalah untuk menegosiasikan distribusi wewenang dan tanggung jawab di antara berbagai

pihak yang bersangkutan. Tanggung jawab harus diambil sejauh mungkin oleh pengguna, dan harus berdasarkan aturan tradisional pengelolaan sampah. Kebijakan nasional sektor, serta rencana pembangunan daerah dan perkotaan, harus mencakup dan mendukung promosi sistem pengelolaan sampah yang dikelola sendiri di tingkat kelembagaan yang tepat.

c. Partisipasi kerjasama antar pihak

Partisipasi kerjasama yang transparan dan komprehensif dalam fakta dan harapan. Hal ini membuat keputusan yang lebih baik dan mudah diterima. Juga dapat menciptakan kesempatan bagi pembelajaran yang interaktif dan untuk mengedepankan komitmen, motivasi, kemitraan dan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki.

d. Pengalihan kepemilikan

Sebuah Tujuan utama dari pendekatan partisipatif adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki dari semua pihak. Kepemilikan dimulai dengan perencanaan dan proyek memastikan keterlibatan pengguna pada setiap tahap proses, dari analisis masalah pada melalui perencanaan, pelaksanaan dan konsolidasi.

Sementara kepemilikan melalui partisipasi merupakan tujuan langsung, realisasi itu sendiri, di hubungannya dengan tujuan aksi kesetaraan dan keberlanjutan, tantangan yang ditemui. Masyarakat tidak homogen tetapi sangat bertingkat dalam hal kekayaan, kekuasaan dan pola kepemilikan. Perhatian utama dari aksi ini yaitu harus fokus dalam kegiatan pengenalan pada lingkungan sosial yang kecil dan homogen. Berdasarkan pengalaman koperasi yang positif dalam kelompok ini, memudahkan untuk mendekati masalah yang lebih kompleks yang mempengaruhi masyarakat di lingkup yang lebih besar.

e. Struktur Gender

Seperti yang diketahui bahwa wanita merupakan pengatur di tingkat domestik dan kesehatan keluarga. Tetapi pada tingkat aksi terkendala pada fisik mereka dalam konstruksi dan perawatan. Kemampuan wanita dan kapasitas dalam membuat keputusan, manajemen dan produksi ekonomi menerima terlalu sedikit perhatian dan harus dipromosikan.

Wanita dan pria memiliki pembeda tehnik spesifik, sosial dan ekologi pengetahuan dan pengalaman, serta bentuk-bentuk mereka sendiri dalam organisasi, yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan infrastruktur. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi aksi bersih sampah, perempuan dan laki-laki harus dilibatkan sebagai pihak dengan hak yang sama, dan hambatan yang ada untuk partisipasi mereka harus dihilangkan atau dikurangi. Secara teknikal, cara kelembagaan dan pendidikan atau pelatihan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pembangunan Gender yang seimbang berarti bahwa kegiatan aksi harus: tidak memiliki efek negatif pada perempuan dan pada hubungan gender yang berlaku, setidaknya menguntungkan bagi perempuan untuk laki-laki, memberikan prioritas kepada perempuan karena mereka paling bertanggung jawab untuk anak-anak

f. Integrasi Sosial dalam Aksi

Aksi dan teknologi harus dapat diterima, dimengerti dan diinginkan oleh keluarga dalam lingkungan sosial yang berbeda dan kelompok. Menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah, anggota badan publik dan masyarakat umum yang terpilih dan dinominasikan, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama.

g. Manajemen perubahan dan dinamisme Kerjasama

Perubahan menciptakan ketidakpastian dan ketakutan. Aksi merupakan proses mencairkan perubahan dan konsolidasi, perlu diskusi yang luas antara orang-orang yang bersangkutan dan pendampingan yang berkompeten. Fase konsolidasi merupakan proses membangun kepercayaan dan kapasitas, yang membutuhkan waktu serta upaya lokal dan dukungan eksternal. Periode keterlibatan dan masukan yang diperlukan, terutama untuk fase konsolidasi, sering diremehkan.

B. Kelembagaan

a. Keterlibatan LSM dan Sektor Swasta

Aksi didasarkan pada hak-hak dan tanggung jawab bersama antara pemegang sektor publik dan swasta. Sedangkan tanggung jawab untuk hukum dan ketertiban harus bergantung pada sektor publik, keterlibatan sektor swasta

dan LSM sebagai mitra dalam tugas dan kegiatan lainnya dapat memperoleh keuntungan yang sinergi dan efisiensi yang lebih besar pada pihak masing-masing (kurang birokrasi). Berbasis lokal dan LSM yang dikelola dapat menjadi mediator yang baik antara pemangku aksi dan sektor publik. Mereka sering mengembangkan mekanisme untuk pelaksanaan aksi yang memenuhi kebutuhan populasi yang bersangkutan. Interaksi yang ditingkatkan antara pemangku aksi dan sektor swasta dapat juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas aksi. Peningkatan keterlibatan swasta dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

b. Penguatan lembaga/ Institusi

Penguatan kapasitas kelembagaan dari berbagai pelaku dapat dicapai dengan cara yang berbeda, misalnya kegiatan pelatihan yang sudah ditargetkan, dukungan dalam penciptaan atau adaptasi struktur kelembagaan tertentu, atau penyederhanaan prosedur administrasi internal, khususnya yang berhubungan dengan desentralisasi kegiatan. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, kondisi kontekstual yang jelas perlu ditetapkan oleh kebijakan sektor nasional (berdasarkan proses partisipatif yang melibatkan semua kelompok yang relevan dari masyarakat).

Koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM dan sektor swasta membutuhkan definisi yang jelas tentang peran masing-masing pihak, terutama dalam hal yang diharapkan oleh setiap masing-masing pihak. Dalam hal ini, komunikasi yang jelas dan adil komunikasi yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan aksi bersih sampah tergantung pada struktur administrasi nasional dengan instrumen eksekutif yang memadai.

c. Perubahan institusional dan fleksibilitas

Organisasi dan struktur terus-menerus melalui proses-proses perubahan. Dinamika ini membawa risiko dan peluang pada saat yang sama. Kebutuhan adaptasi struktural dan fleksibilitas keseluruhan harus selalu diingat.

C. Kondisi Ekonomi

Harga dan model pembiayaan yang tepat untuk investasi dan biaya rutin memainkan peran kunci berkaitan dengan keberlanjutan sistem ekonomi.

Seringkali, kebijakan pembayaran menambah beban konsumen miskin. Dan juga kondisi ekonomi suatu daerah sangat menentukan pembiayaan dalam program aksi bersih sampah

D. Teknologi

Sistem pengelolaan sampah harus berteknologi yang sesuai dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Teknis kesesuaian harus didefinisikan dan dinegosiasikan dengan pengguna selama kelayakan studi. Aspek seperti ketersediaan pengetahuan, keterjangkauan, bahan lokal dan fasilitas pelatihan serta konteks sosial di mana infrastruktur yang telah ada harus dipertimbangkan. Dengan cara ini pengenalan risiko baru dalam sistem yang baru dapat dikurangi. Perubahan tersebut terhadap risiko baru dapat terjadi ketika infrastruktur pengelolaan sampah menurunkan ekologi dan terdapat risiko kesehatan, menciptakan ekonomi (biaya pemeliharaan) baru, politik (dependensi) dan risiko sosial (melemahnya struktur yang ada, aturan dan peraturan serta keterampilan dan pengetahuan).

Sebuah konsep jangka panjang biasanya lebih tepat daripada konsep berskala besar dan. Lebih dapat diterima jika meng-upgrade sistem operasi dan pemeliharaan yang ada untuk memperbaiki dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang tidak dapat beroperasi daripada mengadakan atau membuat prasarana dan sarana yang baru. Sistem pembangunan lokal atau komponen tunggal harus lebih dipromosikan. Penggunaan komputer juga diperlukan untuk manajemen dan administrasi dan hanya diterapkan untuk penanganan perangkat dan software serta layanan dan dukungan yang tersedia. Dikhususkan untuk tenaga terampil ada sejumlah produk perangkat lunak yang dapat diandalkan di pasar yang dapat meringankan tugas manajemen dan administrasi.

E. Peraturan dan Pengetahuan

Waktu dan energi selalu diinvestasikan dalam pengalaman transmisi dan nilai-nilai dari satu generasi ke yang berikutnya. Transmisi pengetahuan selalu terkait dengan budaya latar belakang dan organisasi sosial suatu masyarakat. Kebanyakan pembagian kerja yang berfungsi pada masyarakat berdasarkan dengan jenis kelamin dan kelompok profesional, serta antara keluarga dan masyarakat. Setiap segmen memiliki pengetahuan sendiri (pengalaman) dan

aturan (mendefinisikan hak dan kewajiban). Pengetahuan masyarakat atau pengguna di bidang sosial dan teknis membentuk dasar untuk aksi bersih sampah berkelanjutan

Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan aksi untuk mengidentifikasi pengetahuan dan pengaruh dari setiap kelompok dalam masyarakat lokal, dan untuk mengintegrasikan potensi mereka dalam operasi dan peningkatan pengelolaan sampah. Fungsi dari aksi bergantung pada setelah pelaksanaan aksi itu sendiri. Karena setiap masyarakat mengalami perubahan, mempromosikan kapasitas pemecahan masalah penerima manfaat dapat memupuk sosial budaya keberlanjutan.

3. Output dan Outcome

Output

Tersedianya konsep dan rencana tindak untuk mewujudkan pengelolaan sampah baik yang dibutuhkan dalam waktu cepat (*quick wins*) maupun yang berkelanjutan di lokasi-lokasi terpilih. Tersedianya rancangan komunikasi publik untuk menggerakkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dan sanitasi. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah terpilih,

Outcome

Diterapkannya sistem dan prosedur pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Terciptanya kondisi kebersihan yang sesuai dengan standar pengelolaan sampah. Perubahan perilaku masyarakat pengguna sarana publik untuk berperilaku lebih tertib, baik dan benar dalam pengelolaan sampah. Berfungsinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah dengan optimal. Terawatnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah dengan baik.

4. Strategi Dasar

Pengurangan sampah, pembatasan timbulan sampah melalui pengembangan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur-ulang (*recyclable*) dan dapat terurai di alam (*bio-degradable*) Penerapan EPR dengan pembatasan dan penghindaran penggunaan kantong plastik. Pengembangan pengolahan sampah di sumber diharapkan penurunan angka timbulan sampah per kapita. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk kegiatan pengurangan sampah. Penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*)

Penanganan sampah seperti peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah, pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah, pengembangan dan optimalisasi industri daur ulang dan industri kompos, pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan, pengembangan ilmu dan teknologi pengolahan sampah tepat guna yang berwawasan lingkungan (*environmentally sound technology/EST*), pengembangan TPA Regional kerjasama dengan Kementerian PU, pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis.

Pemanfaatan sampah seperti optimalisasi pemanfaatan kompos, optimalisasi pemanfaatan produk daur ulang, pengembangan pemanfaatan sampah untuk energi alternative (*waste to energy*), pengembangan kemitraan dengan sektor bisnis, pengembangan teknologi pemanfaatan sampah yang berwawasan lingkungan.

Peningkatan kapasitas melalui pengembangan data dan informasi pengelolaan sampah, pengembangan regulasi dan NSPK, pengembangan dan optimalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengukuran kinerja pengelolaan sampah, penegakan hukum, peningkatan anggaran pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru yang berlangsung setiap tahun mengakibatkan efek yang buruk ke segala sisi, dimulai dari kesehatan, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem yang ada serta juga menambah dampak buruk dari tata kelola persampahan di Pekanbaru. Hal ini membuat perlu adanya analisis mengenai rencana aksi bersih sampah yang akan dilakukan di Kota Pekanbaru untuk memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga hak masyarakat untuk dapat hidup dengan lingkungan yang terjaga dan juga kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat dapat diwujudkan melalui aksi bersih sampah ini.

Beberapa analisa kebijakan dalam rencana aksi bersih sampah sebagai bagian dari tindakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu yang pertama dengan cara adanya dasar pemikiran perlunya rencana aksi daerah bersih sampah dengan dibuatnya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Pekanbaru. Peraturan daerah yang dimaksudkan harus

memuat bagaimana mengatur system pengelolaan sampah dan sanksi yang mengatur terhadap pelanggaran tersebut. Kedua, keterlibatan terhadap kebijakan rencana aksi bersih sampah dengan melihat seberapa jauh interegrasi yang terbangun antara konteks budaya dan sosial setempat, kondisi alam, struktur dan lembaga, kondisi ekonomi dan teknologi yang tersedia dan keterampilan. Ketiga adalah output dan outcome serta strategi dasar dalam pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah dan peningkatan kapasitas. Keempat, strategi dasar pengurangan sampah dengan penggalakan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui pengurangan sumber sampah, menggunakan kembali sampah untuk fungsi yang berbeda dan mendaur ulang sehingga bernilai ekonomis.

REFERENSI

- Anugerah, Muhammad Fajar et al. 2020. "STUDI PENDAHULUAN: KONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU 2012-2014." *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 3(2): 115–32.
- BLH Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup. "Rencana Bersih Sampah Kota Pekanbaru 2017."
- Bryson, John M. 1988. "A Strategic Planning Process for Public and Non-Profit Organizations." *Long Range Planning*.
- Doltianus, Masjaya, and Rita Kalalinggi. 2017. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat." *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 4(1): 34–47. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/591>.
- Fajar, M, and Adlin Sujianto. 2016. "Pelaksanaan Koordinasi Dalam Mewujudkan Green City." *Jurnal Kebijakan Publik* 7(1).
- Hasibuan, Rosmidah. 2016. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah "Advokasi."*
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation

Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society*.

Miftah, Thoha. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nandi, Oleh : 2005. “Kajian Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah Dalam Konteks Tata-Ruang.” *Jurusan Pendidikan Geografi*.

Pirngadie, Budi Heri, and Dosen P W K Unpas. 2006. “Pengelolaan Sampah Di Sumbernya Sebagai Alternatif Pencarian Masalah Sampah Perkotaan.” *tidak dipublikasikan*.

Prof, Dr, Mulyadi, Deddy, Drs., M.si. 2016. *Carbohydrate Polymers Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*.

Setiadi, Hafid. 2014. “Dasar-Dasar Teori Perencanaan.” *Modul: 1–47*.

<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/2016/08/08/pwkl4308-teori-perencanaan/#tab-id-3>.

Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yin, R. K. 2014. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications *Case Study Research: Design and Methods (5th Ed.)*.